

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Konversi merupakan pengaturan dari hak-hak tanah yang ada sebelum berlakunya UUPA untuk masuk sistem dalam dari UUPA. Konversi pengaturannya diatur lebih lanjut dalam Pasal VI, di dalam ketentuan mengenai Konversi ini yang dalam pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Agraria No. 2 Tahun 1960 tentang pelaksanaannya beberapa Ketentuan Undang-undang Pokok Agraria, khususnya Pasal 19 dan 22. Dalam Pasal 19 disebutkan, Konversi hak-hak agrarisch eigendom menjadi Hak Milik, Hak Guna Bangunan , Atau Hak Guna Usaha sebagai yang dimaksud dalam Pasal 11, Ketentuan – Ketentuan Konversi Undang – Undang Pokok Agraria yang dilaksanakan pejabat yang bertugas menyelenggarakan pendaftaran tanah menurut Peraturan Menteri No. 9 Tahun 1959, setelah diterimanya salinan surat keputusan penegasan dari Kepala Inspeksi Agraria yang bersangkutan (ayat (1)). Pengajuan untuk memperoleh konversi dapat dilakukan oleh yang mempunyai hak/kepentingan yang harus disertai bukti kewarganegaraan dari yang mempunyai Hak.
- b. Proses Perolehan Hak Guna Bangunan melalui Konversi dapat menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang keberatan atas perolehan hak konversi, dapat melakukan upaya hukum dengan gugatan perdata, gugatan pembatalan, dan pelaporan pidana atau kehendak penyidik sendiri jika dianggap sebagai perbuatan pidana.

2. Saran

- a. Dikarenakan Perolehan Hak Guna Bangunan melalui Konversi, belum ada pengaturan yang tegas dari Pemerintah khususnya Menteri Hukum dan HAM serta Badan Pertanahan Nasional tentang adanya perolehan Hak Guna Bangunan melalui konversi.
- b. Perlu adanya ketegasan dari pejabat pelaksana aturan mengenai Perolehan Hak Guna Bangunan melalui Konversi sehingga tidak menimbulkan adanya konflik atau sengketa atas pelaksanaannya.

